

Peroleh Opini Wajar Dengan Pengecualian

KINERJA PEMKOT DISOROT

SEMARANG—Beberapa fraksi di DPRD Kota Semarang merasa prihatin. Khususnya atas opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah kota Semarang tahun anggaran 2014.

Pasalnya, opini BPK RI atas Laporan Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2012 dan 2013 sebelumnya adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal itu diketahui dalam Rapat Paripurna Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Kota Semarang 2014 di DPRD Kota Semarang, Rabu (10/6).

Ari Purbono, Wakil Ketua Fraksi PKS mengatakan, perolehan opini WDP, menjadi catatan penting atas akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dalam hal ini APBD Kota

Semarang tahun anggaran 2014. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI salah satu catatan besar adalah raibnya uang pemerintah kota sebesar Rp22,7 miliar. Namun demikian tidak menutup kemungkinan ada penyebab lain atas terjadinya WDP ini.

Ari memberikan contoh tentang catatan dari BPK RI, yakni terdapat enam SKPD yang melakukan belanja melebihi anggaran yang ditetapkan dalam APBD. "Merujuk pada Permendagri No 13 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terha-

dap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Fraksi PKS DPRD Kota Semarang mendorong agar pembahasan Laporan Pertanggungjawaban APBD tahun 2014 ini bisa ditempuh dengan pembentukannya panja/pansus di DPRD Kota Semarang," tegasnya.

Hal senada juga disampaikan

kan Fraksi Gerindra. Dalam pandangan fraksi yang disampaikan Sekretaris

Fraksi Gerindra Suharto Masri dikatakan, perolehan opini WDP menurutnya sangat memprihatinkan. Ini merupakan degradasi opini dibanding LPJ APBD Tahun Anggaran 2013.

Selain masalah penilaian BPK dan hilangnya kas daerah Pemkot Semarang Rp 22 miliar, Fraksi Gerindra

juga menyoroti tentang pelaksanaan pembangunan yang gagal.

"Dari informasi yang kami himpun di lapangan, ada indikasi ada persoalan dalam pelaksanaan lelang. Semua itu mengindikasikan ada konspirasi terselubung yang telah dilakukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Semarang untuk memenangkan kontraktor atau kelompok tertentu. Untuk itu, kami usulkan kepada Walikota Semarang agar segera melakukan reformasi birokrasi di lingkungan ULP Kota Semarang secara menyeluruh," tegasnya. (sgt/bow)

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI salah satu catatan besar adalah raibnya uang pemerintah kota sebesar Rp22,7 miliar